

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara terus mengalami reformasi dari tahun ke tahun demi mencapai kesempurnaan dalam mewujudkan tujuannya. Sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban dalam negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan UU tersebut maka keuangan negara membutuhkan pengelolaan yang bersifat profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan pengeluaran negara. Pengelolaan pengeluaran negara harus bersifat efektif dan efisien demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran negara merupakan uang yang keluar dari kas negara yang mana dalam pelaksanaannya diperlukan suatu rancangan. Rancangan tersebut dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan yang terdiri dari anggaran pendapatan negara, anggaran belanja

negara, dan pembiayaan negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, APBN diharapkan dapat mengatur pengeluaran negara agar terencana dan terstruktur dengan baik. Dalam menyusun APBN diperlukan adanya penyusunan usulan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang berisi rancangan kerja dan anggarannya. Oleh karena itu, setiap K/L harus melaksanakan pembukuan terkait aktivitas keuangannya yang nantinya akan disusun menjadi Laporan Keuangan. Laporan Keuangan juga merupakan bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan APBN. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan pemerintah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan dari SAP adalah agar suatu entitas pelaporan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan diterima secara umum.

Suatu K/L harus menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh suatu K/L. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 02, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Realisasi dari masing-masing pos akan diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu. Perbandingan tersebut menggambarkan tingkat capaian dari target-target yang telah ditetapkan dalam suatu instansi. Selain berfungsi

sebagai alat ukur tingkat capaian suatu instansi, LRA juga berguna dalam menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan terkait pengelolaan keuangan negara apakah sumber daya keuangan yang dianggarkan sudah dikelola dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, penyusunan LRA harus mencakup beberapa pos, salah satu pos yang wajib disajikan adalah pos belanja.

Pada awal tahun 2020, seluruh belahan dunia dikejutkan dengan kehadiran suatu virus yang dapat bermutasi dengan cepat. Virus tersebut dinamakan virus corona dan selanjutnya lebih dikenal dengan Covid-19 yang pada awal Maret ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Saat ini kondisi Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 4.260.148 orang yang sudah tertular berdasarkan update terakhir pada 17 Desember 2021 pada situs covid19.go.id. Angka ini terus bertambah seiring ditemukannya varian virus Covid-19 yang baru. Tentu saja pandemi menimbulkan banyak dampak terhadap dinamika kehidupan masyarakat, terutama pada sektor perekonomian. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian terhadap postur pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk perubahan pada rincian besaran anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, pembiayaan anggaran, serta surplus atau defisit anggaran (Wibawa & Wibowo, 2021). Penyesuaian anggaran belanja negara tentunya berdampak pada pelaporan realisasi belanja yang ada pada tiap satuan kerja karena sebelum melakukan realisasi maka diperlukan penganggaran terlebih dahulu. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, realisasi belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kanwil DJBC Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah Rp15.054.102.370 dan pada tahun 2019 adalah

Rp15.927.448.049. Dari data tersebut, realisasi belanja pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar Rp873.345.679 dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara atau biasa disebut Kanwil DJBC Sumatera Utara adalah suatu instansi vertikal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kanwil DJBC Sumatera Utara juga merupakan suatu entitas pelaporan yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang wajib melaporkan laporan keuangannya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2020, realisasi belanja pada Kanwil DJBC Sumatera Utara terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi topik penelitian yang akan diuraikan ke dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan atas Realisasi Belanja di Masa Pandemi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis membahas beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana kesesuaian struktur LRA yang disusun oleh Kanwil DJBC Sumatera Utara dengan kebijakan penyusunan LRA pada PSAP 02?
2. Apa saja klasifikasi akun belanja di Kanwil DJBC Sumatera Utara selama masa pandemi?

3. Bagaimana perbedaan realisasi belanja Kanwil DJBC Sumatera Utara sebelum dan sesudah pandemi?
4. Bagaimana dampak adanya pandemi terhadap realisasi belanja pada Kanwil DJBC Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui kesesuaian struktur LRA yang disusun oleh Kanwil DJBC Sumatera Utara dengan kebijakan penyusunan LRA pada PSAP 02.
2. Mengetahui klasifikasi akun belanja di Kanwil DJBC Sumatera Utara selama masa pandemi.
3. Mengetahui perbedaan realisasi belanja Kanwil DJBC Sumatera Utara sebelum dan sesudah pandemi.
4. Mengetahui dampak adanya pandemi terhadap realisasi belanja pada Kanwil DJBC Sumatera Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan membahas mengenai Realisasi Belanja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (sebelum pandemi) dan Tahun Anggaran 2020 (saat pandemi).

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang realisasi belanja, khususnya menambah pengetahuan dan wawasan tentang realisasi belanja di masa pandemic COVID-19 pada Kanwil DJBC Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat membantu penulis dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan pemahaman tentang ilmu Akuntansi Pemerintah, khususnya tentang realisasi belanja.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang menjadi dasar terkait pembahasan dalam topik Karya Tulis Tugas Akhir. Teori tersebut meliputi teori tentang Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran terutama pada bagian belanja, Akuntansi Belanja, dan Pandemi Covid-19.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis. Selanjutnya, bab ini akan memberikan data dan fakta terkait objek dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir

ini, yaitu gambaran umum dan penerapan akuntansi terkait realisasi belanja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akan disajikan dalam sub bab atau bagian sub bab sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisikan simpulan dari hasil tinjauan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara yang sudah dilakukan oleh penulis dan terlampir pada bab-bab sebelumnya. Penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan pribadi penulis.